

# PENGARUH OPTIMALISASI APLIKASI SIAPKERJA TERHADAP PENURUNAN ANGKA PENGANGGURAN DI KOTA PONTIANAK

Rais Fakhri Munawar

NPP. 33.0730

Program Studi Teknologi Rekayasa Informasi Pemerintahan

Email: [33.0730@praja.ipdn.ac.id](mailto:33.0730@praja.ipdn.ac.id)

Pembimbing Skripsi: Drs. Helianus Rudianto, M.Si

Email: [helianus\\_rudianto72@yahoo.com](mailto:helianus_rudianto72@yahoo.com)

## ABSTRACT

**Problem Statement (Research Gap):** Pontianak City recorded an open unemployment rate of 8.29% in 2024, higher than the national and West Kalimantan averages. The SIAPkerja application provides integrated job vacancies, training, certification, and employment services, but its local utilization and contribution to employment outcomes have not been sufficiently assessed. Previous studies mainly examine online job-search behavior or digital service quality, while empirical evidence on the relationship between optimizing a government employment platform and unemployment reduction at the municipal level remains limited. **Purpose:** This study aims to analyze the effect of SIAPkerja application optimization on reducing unemployment in Pontianak City. **Method:** The study applied a quantitative associative design. A questionnaire was administered to 100 job seekers selected purposively from a population of approximately 26,900 people. Data were tested through validity, reliability, normality, simple linear regression, coefficient of determination, and t-test using SPSS. **Result:** All 22 questionnaire items were valid, and the instrument was highly reliable with Cronbach's Alpha of 0.976. The regression equation was  $Y = -0.198 + 0.099X$ . SIAPkerja optimization had a positive and significant effect on the perceived reduction of unemployment ( $t = 15.026$ ;  $p < 0.001$ ). The model produced  $R^2 = 0.687$  and adjusted  $R^2 = 0.684$ . **Conclusion:** Better digital governance, system reliability, service integration, and user participation in SIAPkerja are associated with stronger access to employment information and perceived opportunities to reduce unemployment. Local implementation should be strengthened through service integration, digital literacy assistance, data security, and continuous monitoring.

**Keywords:** digital governance; employment services; SIAPkerja; technology strategy; unemployment

## ABSTRAK

**Permasalahan (Kesenjangan Penelitian/Research Gap):** Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Pontianak pada 2024 mencapai 8,29%, lebih tinggi daripada rata-rata nasional dan Provinsi Kalimantan Barat. Aplikasi SIAPkerja menyediakan layanan lowongan, pelatihan, sertifikasi, dan informasi ketenagakerjaan secara terpadu, tetapi pemanfaatan dan kontribusinya pada tingkat lokal belum dievaluasi secara memadai. Penelitian terdahulu lebih banyak membahas perilaku pencarian kerja daring atau kualitas layanan digital, sedangkan bukti empiris mengenai pengaruh optimalisasi platform ketenagakerjaan pemerintah terhadap penurunan pengangguran pada tingkat kota masih terbatas. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh optimalisasi aplikasi SIAPkerja terhadap penurunan angka pengangguran di Kota Pontianak. **Metode:** Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif asosiatif. Kuesioner diberikan kepada 100 pencari kerja yang dipilih secara purposive dari populasi sekitar 26.900 orang. Data diuji melalui validitas, reliabilitas, normalitas,

regresi linear sederhana, koefisien determinasi, dan uji t menggunakan SPSS. **Hasil/Temuan:** Seluruh 22 butir instrumen valid dan memiliki Cronbach's Alpha 0,976. Persamaan regresi diperoleh  $Y = -0,198 + 0,099X$ . Optimalisasi SIAPkerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap persepsi penurunan pengangguran dengan t hitung 15,026 dan  $p < 0,001$ . Nilai  $R^2$  sebesar 0,687 dan adjusted  $R^2$  sebesar 0,684. **Kesimpulan:** Penguatan governansi digital, keandalan sistem, integrasi layanan, dan partisipasi pengguna pada SIAPkerja berkaitan dengan peningkatan akses informasi kerja dan peluang penempatan tenaga kerja. Implementasi lokal perlu diperkuat melalui integrasi layanan, pendampingan literasi digital, keamanan data, dan evaluasi berkelanjutan.

**Kata kunci:** *governansi digital; layanan ketenagakerjaan; pengangguran; SIAPkerja; strategi teknologi informasi*

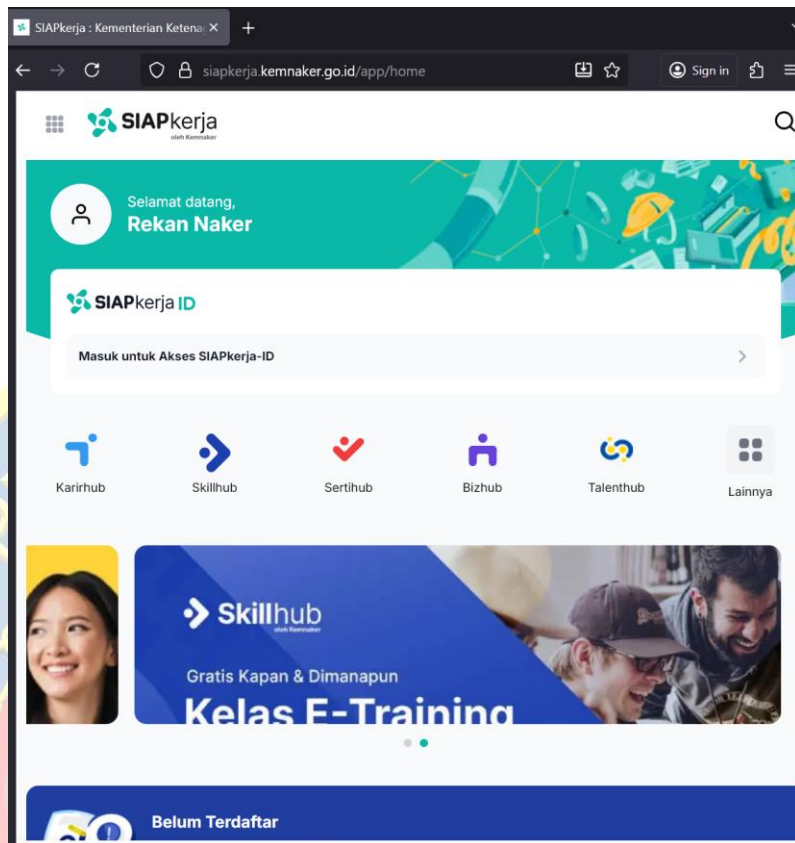
## I. PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Pengangguran masih menjadi persoalan pembangunan karena mencerminkan ketidakseimbangan antara jumlah pencari kerja, ketersediaan lapangan kerja, dan kesesuaian kompetensi. Pada 2024, Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Pontianak tercatat 8,29%, lebih tinggi daripada angka nasional 4,76% dan Provinsi Kalimantan Barat 4,20%. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perbaikan pada tingkat nasional belum otomatis menyelesaikan persoalan pasar kerja perkotaan. Pemerintah perlu memperluas akses informasi pekerjaan, pelatihan, sertifikasi, dan pencocokan kerja melalui pelayanan ketenagakerjaan yang lebih terintegrasi.

Teknologi digital dapat menurunkan biaya pencarian kerja dan memperluas komunikasi antara pencari kerja dan pemberi kerja. Autor (2001) menjelaskan bahwa internet membuka saluran baru dalam proses pencocokan tenaga kerja, sedangkan Stevenson (2009) menunjukkan bahwa pencarian kerja melalui internet berkaitan dengan perubahan intensitas pencarian dan peluang memperoleh pekerjaan. Transformasi digital pemerintah juga menuntut perubahan proses, kapasitas organisasi, dan orientasi layanan, bukan hanya pemindahan layanan ke kanal daring (Mergel et al., 2019).

Kementerian Ketenagakerjaan mengembangkan SIAPkerja sebagai ekosistem digital yang menghubungkan layanan identitas ketenagakerjaan, lowongan kerja, pelatihan, sertifikasi, dan pengembangan talenta. Aplikasi ini telah diunduh lebih dari satu juta kali secara nasional. Namun, data pemanfaatan pada tingkat Kota Pontianak belum tersedia secara terbuka. Kajian IPDN memperlihatkan bahwa keberhasilan sistem pemerintah dipengaruhi oleh kualitas sistem, kualitas layanan, literasi digital, kapasitas kelembagaan, dan dukungan organisasi (Nurnila et al., 2025; Matutina & Fahlevvi, 2025; Basri & Nurrahman, 2025; Ekowati & Supintar, 2025; Puspita Sari & Kusmana, 2025).



**Gambar 1.** Laman utama aplikasi SIAPkerja  
*Sumber: siapkerja.kemnaker.go.id.*

### 1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (Research Gap)

Kesenjangan empiris terletak pada tingginya pengangguran Kota Pontianak ketika pemerintah telah menyediakan platform ketenagakerjaan digital secara nasional. Jumlah unduhan yang besar belum cukup membuktikan bahwa SIAPkerja telah digunakan secara optimal oleh pencari kerja lokal. Masih terdapat kendala integrasi data, literasi digital, keandalan sistem, keamanan, dan koordinasi layanan yang dapat membatasi manfaat aplikasi.

Kesenjangan akademik muncul karena studi pasar kerja digital menghasilkan temuan yang tidak selalu seragam. Kuhn dan Mansour (2014) menunjukkan bahwa pencarian kerja melalui internet semakin efektif dalam konteks tertentu, sedangkan Kroft dan Pope (2014) menekankan bahwa platform daring dapat meningkatkan efisiensi pencocokan tanpa sepenuhnya menggantikan kanal tradisional. Penelitian kualitas layanan digital juga lebih sering menilai kepuasan dan pengalaman pengguna melalui kualitas sistem dan layanan (Papadomichelaki & Mentzas, 2012; Aljukhadar et al., 2022), bukan menguji hubungannya dengan persepsi penurunan pengangguran pada tingkat pemerintah kota. Selain itu, adopsi layanan e-government dipengaruhi kepercayaan dan penerimaan pengguna (Carter & Belanger, 2005), sehingga ketersediaan aplikasi saja belum menjamin penggunaan yang berkelanjutan.

### 1.3. Urgensi Penelitian

Penelitian ini penting karena Kota Pontianak membutuhkan dasar empiris untuk menentukan apakah penguatan SIAPkerja layak sebagai bagian dari strategi penanggulangan pengangguran ditempatkan daerah. Tanpa evaluasi, pemerintah berisiko menilai keberhasilan hanya dari jumlah

unduhan, bukan dari kemudahan akses, kualitas informasi, integrasi layanan, dan peluang kerja yang dirasakan pengguna. Keberlanjutan penggunaan sistem juga bergantung pada manfaat dan pengalaman yang dikonfirmasi pengguna (Bhattacharjee, 2001).

Secara praktis, hasil penelitian dapat menjadi dasar bagi Dinas Tenaga Kerja untuk memperkuat koordinasi dengan Kementerian Ketenagakerjaan, pemberi kerja, lembaga pelatihan, dan pencari kerja. Temuan IPDN tentang smart governance, literasi digital, dan digitalisasi layanan menunjukkan bahwa manfaat layanan digital meningkat ketika pemerintah memperkuat infrastruktur, pemahaman pengguna, ketepatan sasaran, serta akuntabilitas pengelolaan sistem (Basri & Nurrahman, 2025; Matutina & Fahlevvi, 2025; Ekowati & Supintar, 2025).

#### 1.4. Penelitian Terdahulu

Sepuluh rujukan inti berikut mewakili lima karya dosen atau civitas akademika IPDN dan lima artikel jurnal internasional bereputasi yang paling dekat dengan topik penelitian. Lima artikel lain digunakan untuk memperkuat kerangka adopsi teknologi, kualitas layanan, dan keberlanjutan penggunaan sistem.

**Tabel 1.** Ringkasan penelitian terdahulu utama

No.	Peneliti/Tahun	Fokus	Relevansi
1	Nurnila et al. (2025)	Keberhasilan sistem SIRUP	Kualitas sistem dan layanan memengaruhi penggunaan serta kepuasan.
2	Matutina & Fahlevvi (2025)	Literasi digital dan e-government	Kemampuan, akses, dan kepercayaan memengaruhi adopsi layanan digital.
3	Basri & Nurrahman (2025)	Smart governance	Kapasitas kelembagaan dan infrastruktur menentukan efektivitas layanan digital.
4	Ekowati & Supintar (2025)	Digitalisasi manajemen ASN	Efektivitas sistem dipengaruhi pemahaman program dan ketepatan pelaksanaan.
5	Puspita Sari & Kusmana (2025)	Inovasi pelayanan digital	Sosialisasi dan jangkauan layanan menentukan pemanfaatan inovasi.
6	Autor (2001)	Internet dan pasar kerja	Internet memperluas komunikasi serta proses pencocokan pekerja dan pekerjaan.
7	Stevenson (2009)	Pencarian kerja melalui internet	Internet mengubah intensitas pencarian dan hasil pencarian kerja.
8	Kuhn & Mansour (2014)	Efektivitas pencarian kerja daring	Pencarian daring dapat memperbaiki peluang kerja pada kondisi tertentu.
9	Kroft & Pope (2014)	Platform daring dan efisiensi pencocokan	Platform daring meningkatkan akses tanpa sepenuhnya menggantikan kanal tradisional.
10	Mergel et al. (2019)	Transformasi digital sektor publik	Transformasi membutuhkan perubahan proses, organisasi, dan orientasi pengguna.

Sumber: Diolah oleh penulis, 2026.

#### 1.5. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Kebaruan penelitian terletak pada pengujian kuantitatif hubungan antara optimalisasi SIAPkerja dan penurunan pengangguran pada konteks Kota Pontianak. Optimalisasi tidak hanya dipahami sebagai penggunaan teknologi, tetapi sebagai gabungan governansi digital dan strategi teknologi informasi yang meliputi transparansi, akuntabilitas, partisipasi, integritas layanan, keamanan data, dan keberlanjutan sistem. Penelitian menghubungkan kualitas tata kelola platform dengan persepsi akses terhadap informasi kerja dan peluang penempatan tenaga kerja.

## 1.6. Tujuan

Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh optimalisasi aplikasi SIAPkerja terhadap penurunan angka pengangguran di Kota Pontianak.

## II. METODE

Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif asosiatif. Pendekatan ini dipilih untuk mengukur arah dan besarnya hubungan antara optimalisasi aplikasi SIAPkerja sebagai variabel bebas dan penurunan angka pengangguran sebagai variabel terikat. Penggunaan survei sesuai dengan penelitian adopsi layanan digital yang menilai persepsi pengguna secara terstruktur (Carter & Belanger, 2005), sedangkan indikator kualitas layanan dan keberhasilan sistem mempertimbangkan kemudahan, keandalan, dukungan, serta manfaat yang diterima pengguna (DeLone & McLean, 2003; Papadomichelaki & Mentzas, 2012; Aljukhadar et al., 2022).

Populasi penelitian terdiri atas sekitar 26.900 pencari kerja di Kota Pontianak. Sampel berjumlah 100 responden, ditentukan menggunakan rumus Slovin dengan margin of error 10% dan dipilih secara purposive. Kriteria responden meliputi pencari kerja yang berdomisili di Kota Pontianak, berada pada usia produktif, serta pernah menggunakan atau mengetahui layanan SIAPkerja. Penelitian dilaksanakan di Kota Pontianak pada 5-24 Januari 2026.

Instrumen berupa kuesioner tertutup dengan skala Likert 1-5 dan 22 butir pernyataan. Variabel optimalisasi SIAPkerja mengukur transparansi, akuntabilitas, partisipasi publik, integritas layanan, perencanaan dan keamanan data, serta keberlanjutan layanan. Variabel penurunan pengangguran mengukur persepsi responden terhadap peningkatan akses informasi kerja dan peluang memperoleh pekerjaan. Uji instrumen menggunakan Pearson Product Moment dan Cronbach's Alpha. Analisis utama menggunakan regresi linear sederhana, koefisien determinasi, dan uji t dengan SPSS.

**Tabel 2.** Ringkasan desain penelitian

Komponen	Keterangan	Nilai/Indikator
Populasi	Pencari kerja Kota Pontianak	±26.900 orang
Sampel	Purposive sampling; Slovin 10%	100 responden
Variabel X	Optimalisasi SIAPkerja	Governansi digital dan strategi TI
Variabel Y	Penurunan pengangguran	Akses informasi dan peluang kerja
Instrumen	Kuesioner Likert	22 butir
Analisis	Regresi linear sederhana	SPSS
Waktu dan lokasi	5-24 Januari 2026	Kota Pontianak

*Sumber: Diolah oleh penulis, 2026.*

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

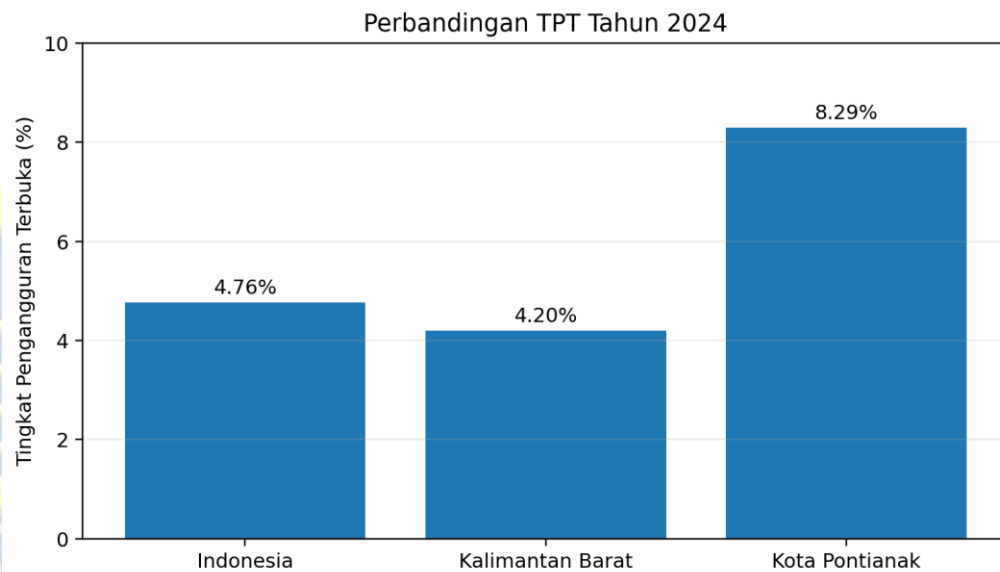
### 3.1. Konteks Optimalisasi SIAPkerja di Kota Pontianak

Kota Pontianak menghadapi tekanan pasar kerja yang lebih tinggi daripada rata-rata nasional dan provinsi. Pada 2024, TPT Kota Pontianak sebesar 8,29%, sedangkan angka nasional 4,76% dan Kalimantan Barat 4,20%. Perbedaan ini memperlihatkan bahwa layanan ketenagakerjaan digital perlu diarahkan secara spesifik pada kebutuhan lokal, termasuk ketidaksesuaian keterampilan, urbanisasi, dan keterbatasan informasi lowongan kerja.

**Tabel 3.** Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka

Wilayah/Tahun	TPT	Keterangan
Indonesia	4,76%	Acuan nasional
Kalimantan Barat	4,20%	Acuan provinsi
Kota Pontianak	8,29%	Lebih tinggi dari nasional dan provinsi
Kota Pontianak 2023	8,92%	Menurun 0,63 poin pada 2024

Sumber: Diolah dari data BPS, 2026.

**Gambar 2.** Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka Tahun 2024

Sumber: Diolah oleh penulis, 2026.

SIAPkerja menyediakan akses terpusat terhadap lowongan kerja, pelatihan, sertifikasi, dan layanan ketenagakerjaan. Hasil kuesioner menunjukkan bahwa responden menilai transparansi informasi dan kemudahan akses sebagai manfaat utama. Namun, optimalisasi masih memerlukan integrasi data yang lebih kuat, pembaruan lowongan, pendampingan pengguna, keamanan data, dan keberlanjutan layanan. Kondisi tersebut sejalan dengan temuan Nurnila et al. (2025) bahwa kualitas sistem dan layanan menentukan keberhasilan sistem pemerintah, serta Matutina dan Fahlevvi (2025) yang menekankan peran literasi digital dan kepercayaan institusional.

### 3.2. Kualitas Instrumen dan Kelayakan Model

Uji validitas awal dilakukan terhadap 30 responden dengan  $r$  tabel 0,361. Seluruh 22 item memiliki nilai korelasi di atas  $r$  tabel dan signifikansi di bawah 0,05, sehingga dinyatakan valid. Nilai Cronbach's Alpha sebesar 0,976 menunjukkan konsistensi internal yang sangat tinggi. Pemeriksaan histogram dan Normal P-P Plot menunjukkan residual mengikuti pola distribusi normal, sehingga model regresi layak dilanjutkan.

**Tabel 4.** Ringkasan hasil pengujian statistik

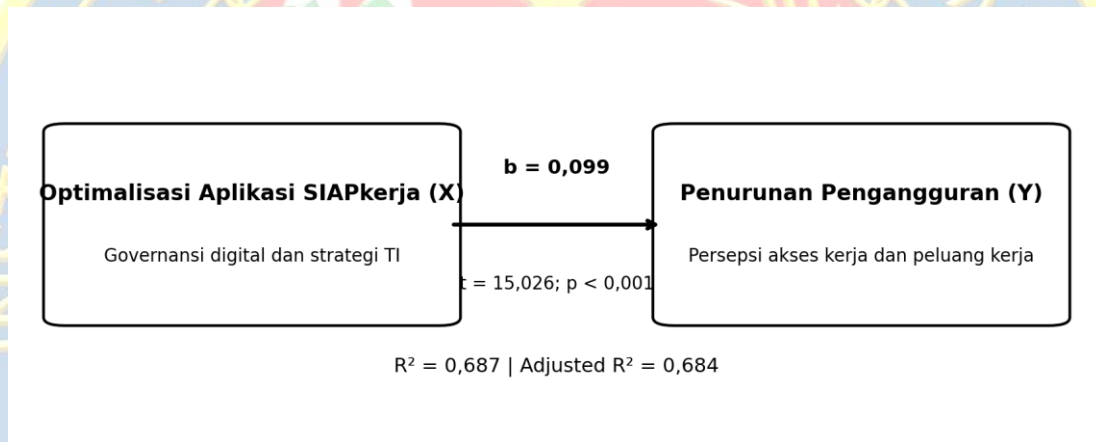
Pengujian	Indikator	Hasil
Validitas	22 item	Seluruh item valid; $r$ hitung > 0,361
Reliabilitas	Cronbach's Alpha	0,976; sangat reliabel
Normalitas	Histogram dan P-P Plot	Asumsi terpenuhi

Pengujian	Indikator	Hasil
Persamaan regresi	$Y = -0,198 + 0,099X$	Hubungan positif
Koefisien regresi	b	0,099
Uji t	t hitung; Sig.	15,026; <0,001
Koefisien determinasi	R <sup>2</sup> ; Adjusted R <sup>2</sup>	0,687; 0,684

Sumber: Diolah oleh penulis menggunakan SPSS, 2026.

### 3.3. Pengaruh Optimalisasi SIAPKerja terhadap Penurunan Pengangguran

Persamaan regresi  $Y = -0,198 + 0,099X$  menunjukkan hubungan searah. Setiap kenaikan satu satuan optimalisasi SIAPKerja diikuti peningkatan 0,099 satuan pada variabel penurunan pengangguran. Nilai t hitung 15,026 dengan  $p < 0,001$  membuktikan pengaruh positif dan signifikan secara statistik. Nilai R<sup>2</sup> sebesar 0,687 menunjukkan bahwa 68,7% variasi pada variabel penurunan pengangguran dapat dijelaskan oleh optimalisasi aplikasi, sedangkan 31,3% dijelaskan faktor lain. Adjusted R<sup>2</sup> sebesar 0,684 menunjukkan model tetap kuat setelah memperhitungkan jumlah prediktor.



**Gambar 3.** Model empiris pengaruh optimalisasi SIAPKerja

Sumber: Diolah oleh penulis, 2026.

Temuan ini mendukung literatur yang menyatakan bahwa platform digital dapat mengurangi friksi informasi dan mempercepat proses pencocokan kerja (Autor, 2001; Stevenson, 2009). Hasil penelitian juga sejalan dengan Kuhn dan Mansour (2014), yang menunjukkan bahwa efektivitas pencarian kerja daring meningkat ketika penggunaan teknologi telah menjadi bagian dari perilaku pencari kerja. Namun, temuan Kroft dan Pope (2014) mengingatkan bahwa kanal digital tidak selalu menggantikan layanan konvensional. Karena itu, SIAPKerja perlu ditempatkan sebagai bagian dari ekosistem penempatan tenaga kerja yang mencakup konseling, pelatihan, verifikasi pemberi kerja, dan layanan tatap muka.

### 3.4. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Pengaruh yang kuat dalam model menunjukkan bahwa responden menghubungkan optimalisasi SIAPKerja dengan akses kerja yang lebih baik. Governansi digital berperan melalui keterbukaan informasi, mekanisme pertanggungjawaban, partisipasi pengguna, dan integritas layanan. Strategi teknologi informasi berperan melalui kemudahan akses lintas perangkat, keamanan data, stabilitas sistem, dan ketersediaan layanan. Kerangka ini konsisten dengan konsep keberhasilan sistem yang menempatkan kualitas sistem, informasi, dan layanan sebagai pembentuk penggunaan dan manfaat bersih (DeLone & McLean, 2003).

Dari sisi pengalaman pengguna, kemudahan, keandalan, informasi yang mutakhir, dan dukungan pengguna merupakan unsur penting kualitas layanan digital pemerintah (Papadomichelaki & Mentzas, 2012; Aljukhadar et al., 2022). SIAPkerja perlu memastikan lowongan telah diverifikasi, informasi selalu diperbarui, proses login aman, dan bantuan mudah dijangkau. Kepercayaan serta penerimaan pengguna juga menentukan pemanfaatan layanan e-government (Carter & Belanger, 2005), sedangkan penggunaan berkelanjutan dipengaruhi oleh manfaat yang dirasakan dan pengalaman yang memenuhi harapan (Bhattacharjee, 2001).

Temuan penelitian juga memperkuat kajian IPDN. Basri dan Nurrahman (2025) menegaskan pentingnya kapasitas smart governance dan infrastruktur. Ekowati dan Supintar (2025) menunjukkan bahwa digitalisasi tidak efektif tanpa pemahaman pengguna dan ketepatan pelaksanaan. Puspita Sari dan Kusmana (2025) memperlihatkan pentingnya sosialisasi dan perluasan jangkauan inovasi. Karena itu, optimalisasi SIAPkerja di Kota Pontianak perlu memadukan perbaikan teknologi, literasi digital, kolaborasi pemberi kerja, dan pendampingan pencari kerja.

Interpretasi hasil tetap memerlukan kehati-hatian. Variabel penurunan pengangguran diukur melalui persepsi responden dalam survei potong lintang, bukan melalui eksperimen atau deret waktu perubahan TPT setelah penggunaan aplikasi. Oleh sebab itu, hasil menunjukkan hubungan statistik yang kuat pada tingkat pengguna, tetapi belum membuktikan bahwa SIAPkerja secara tunggal menyebabkan penurunan TPT kota. Pengangguran juga dipengaruhi pertumbuhan ekonomi, investasi, struktur industri, kompetensi tenaga kerja, upah, migrasi, dan kebijakan pasar kerja.

#### **IV. KESIMPULAN**

Penelitian menyimpulkan bahwa optimalisasi aplikasi SIAPkerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel penurunan angka pengangguran di Kota Pontianak. Persamaan regresi  $Y = -0,198 + 0,099X$ , nilai  $t$  hitung 15,026, dan  $p < 0,001$  menunjukkan bahwa peningkatan kualitas governansi digital dan strategi teknologi informasi berkaitan dengan peningkatan akses informasi kerja dan peluang penempatan tenaga kerja. Model menjelaskan 68,7% variasi variabel dependen, dengan adjusted  $R^2$  sebesar 68,4%.

Pemerintah Kota Pontianak perlu memperkuat integrasi data lowongan, pembaruan informasi, verifikasi pemberi kerja, keamanan data, stabilitas sistem, pendampingan literasi digital, dan koordinasi antara Dinas Tenaga Kerja, Kementerian Ketenagakerjaan, lembaga pelatihan, serta dunia usaha. Penguatan tersebut perlu disertai indikator hasil yang terukur, seperti jumlah pengguna aktif, jumlah lamaran, penempatan kerja, durasi pencarian kerja, dan perubahan TPT.

#### **Keterbatasan Penelitian**

Penelitian menggunakan survei potong lintang dan purposive sampling, sehingga temuan terutama menggambarkan persepsi 100 responden. Model belum memasukkan faktor ekonomi dan struktural lain yang memengaruhi pengangguran.

#### **Arah Masa Depan Penelitian (Future Work)**

Penelitian lanjutan perlu menggunakan data longitudinal, data administratif penempatan kerja, kelompok pembanding, dan analisis multivariat agar pengaruh SIAPkerja terhadap hasil ketenagakerjaan dapat diuji lebih kuat.

#### **V. UCAPAN TERIMA KASIH**

Ucapan terima kasih disampaikan kepada Dinas Tenaga Kerja Kota Pontianak, para pencari kerja yang menjadi responden, dosen pembimbing, serta seluruh pihak yang mendukung pelaksanaan penelitian dan penyusunan skripsi ini.

## VI. DAFTAR PUSTAKA

- Aljukhadar, M., Belisle, J.-F., Dantas, D. C., Senecal, S., & Titah, R. (2022). Measuring the service quality of governmental sites: Development and validation of the e-government service quality (EGSQUAL) scale. *Electronic Commerce Research and Applications*, 55, 101182. <https://doi.org/10.1016/j.elerap.2022.101182>
- Autor, D. H. (2001). Wiring the labor market. *Journal of Economic Perspectives*, 15(1), 25-40. <https://doi.org/10.1257/jep.15.1.25>
- Badan Pusat Statistik Kota Pontianak. (2024). Kota Pontianak dalam angka 2024. <https://pontianakkota.bps.go.id/id/publication/2024/02/28/dc35f87750e786900eda55be/kota-pontianak-dalam-angka-2024.html>
- Badan Pusat Statistik. (2025). Berita resmi statistik: Keadaan ketenagakerjaan Indonesia Februari 2025. <https://www.bps.go.id/id/infographic>
- Basri, M. H., & Nurrahman, A. (2025). Analisis penerapan smart governance di Kabupaten Polewali Mandar. *Jurnal Teknologi dan Komunikasi Pemerintahan*, 7(2), 254-274. <https://doi.org/10.33701/jtkp.v7i2.5810>
- Bhattacharjee, A. (2001). Understanding information systems continuance: An expectation-confirmation model. *MIS Quarterly*, 25(3), 351-370. <https://doi.org/10.2307/3250921>
- Carter, L., & Belanger, F. (2005). The utilization of e-government services: Citizen trust, innovation and acceptance factors. *Information Systems Journal*, 15(1), 5-25. <https://doi.org/10.1111/j.1365-2575.2005.00183.x>
- DeLone, W. H., & McLean, E. R. (2003). The DeLone and McLean model of information systems success: A ten-year update. *Journal of Management Information Systems*, 19(4), 9-30. <https://doi.org/10.1080/07421222.2003.11045748>
- Ekowati, M., & Supintar, D. B. (2025). Efektivitas digitalisasi manajemen PNS melalui Sistem Informasi Pengelolaan dan Pelayanan ASN di Kabupaten Grobogan. *Jurnal Media Birokrasi*, 7(2), 174-188. <https://ejournal.ipdn.ac.id/JMB/article/view/5626>
- Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. (2022). Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Sistem Informasi Ketenagakerjaan. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/197508/permenaker-no-2-tahun-2022>
- Kroft, K., & Pope, D. G. (2014). Does online search crowd out traditional search and improve matching efficiency? Evidence from Craigslist. *Journal of Labor Economics*, 32(2), 259-303. <https://doi.org/10.1086/673374>
- Kuhn, P., & Mansour, H. (2014). Is Internet job search still ineffective? *The Economic Journal*, 124(581), 1213-1233. <https://doi.org/10.1111/ecoj.12119>
- Matutina, E. J. B., & Fahlevvi, M. R. (2025). Kesenjangan generasi dan geografis dalam literasi digital: Implikasinya terhadap kebijakan e-government di Kabupaten Sorong. *Jurnal Teknologi dan Komunikasi Pemerintahan*, 7(2), 201-216. <https://doi.org/10.33701/jtkp.v7i2.5771>
- Mergel, I., Edelman, N., & Haug, N. (2019). Defining digital transformation: Results from expert interviews. *Government Information Quarterly*, 36(4), 101385. <https://doi.org/10.1016/j.giq.2019.06.002>
- Nurnila, N., Indrayani, E., Nainggolan, R. R. E., & Daud, S. (2025). Analyzing the successful implementation of General Procurement Information System (SIRUP) using the DeLone and McLean model in Muna Regency, Southeast Sulawesi. *Jurnal Teknologi dan Komunikasi Pemerintahan*, 7(2), 153-180. <https://doi.org/10.33701/jtkp.v7i2.5745>
- Papadomichelaki, X., & Mentzas, G. (2012). E-GovQual: A multiple-item scale for assessing e-government service quality. *Government Information Quarterly*, 29(1), 98-109. <https://doi.org/10.1016/j.giq.2011.08.011>

- Presiden Republik Indonesia. (2018). Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/96913/perpres-no-95-tahun-2018>
- Puspita Sari, D. A., & Kusmana, D. (2025). Terobosan baru pelayanan arsip melalui pengarsipan digital pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Klaten. *Jurnal Media Birokrasi*, 7(2), 204-219. <https://ejournal.ipdn.ac.id/JMB/article/view/5814>
- Stevenson, B. (2009). The Internet and job search. *Labour Economics*, 16(5), 576-590. <https://doi.org/10.1016/j.labeco.2009.04.005>

